

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilisasi masyarakat pada kondisi saat ini tentu tidak bisa dihindari dengan adanya kemacetan di berbagai ruas jalan. Namun, transportasi adalah alat yang penting dalam pengembangan wilayah. Pada sisi lain, transportasi juga memiliki segudang permasalahan yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, politik, lingkungan dan wilayah tersebut. Transportasi di Kota Bandung tidak lepas dari kepadatan yang menyebabkan kemacetan pada wilayah pemukiman penduduk. Oleh sebab itu, kemacetan menjadi suatu keadaan yang menghambat akibat banyaknya kendaraan melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia.

Kemacetan menjadi permasalahan utama di kota-kota besar, terutama jika tidak disertai dengan ketersediaan transportasi publik yang baik dan memadai. Kemacetan bisa terjadi akibat kurangnya infrastruktur jalan namun kepadatan penduduk semakin meningkat terutama yang terjadi di Kota Bandung. Kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat. Penumpukan kendaraan di jalan tidak mampu diimbangi oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang setara dengan jumlah kendaraan berlalu lintas. Hal tersebut menyebabkan kendaraan menjadi terhambat dan kecepatan dalam berkendara turut melambat dan menghambat efisiensi waktu.

Salah satu bentuk kebijakan pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas termuat aturan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas guna menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan serta kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan yang beroperasi secara aktif. Aturan tersebut juga merupakan suatu meliputi serangkaian usaha guna meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan hingga pemeliharaan fasilitas penunjang jalan.

Dilansir pada berita Detik Jabar pada tanggal 23 September 2022, data menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar mengatakan bahwa pertumbuhan kendaraan paling tinggi salah satunya terjadi di Kota Bandung yang mencapai 6.025.48 unit terhitung pada tahun 2014-2019. Angka tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih tinggi antara banyaknya kendaraan dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 2,5 juta jiwa. Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebutkan bahwa ada dua puluh delapan (28) titik kemacetan yang terjadi di kota Bandung. Maka hal tersebut dijadikan sebagai prioritas yang termuat pada sasaran target RPJPD 2018-2023. Menurut Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia pada tahun 2019 menyebutkan bahwa Kota Bandung berada di peringkat ke-14 sebagai kota termacet di Asia. Bandung menjadi salah satu kota termacet dengan menyalip Jakarta serta Surabaya. Adapun pada kajian Bapennas dan Bank Dunia menjelaskan bahwa tiga kota termacet se-Indonesia yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Benang kusut kemacetan Kota Bandung belum mampu terurai sebab jumlah kendaraan yang terlalu banyak digunakan menjadi faktor utama kemacetan terjadi di Kota Bandung. Selain *flyover*, kebijakan lainnya yang menjadi fokus utama Pemkot Bandung adalah penguatan transportasi umum. Namun, faktanya angkutan

umum yang ada di Kota Bandung belum menarik perhatian masyarakat. Pada berita online tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat mengeluhkan kondisi kemacetan jalan raya.

Salah satu kota yang dijadikan sebagai pusat pariwisata, Bandung juga dikenal dengan jumlah masyarakat yang besar. Banyaknya populasi masyarakat menyebabkan mobilisasi yang terjadi di Kota Bandung semakin tinggi sehingga menimbulkan kemacetan diberbagai titik sudut kota. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Bandung turut merasakan dampak permasalahan akibat kepadatan penduduk yang ada. Selain mobilisasi yang tinggi, Kota Bandung juga dijadikan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya.

Tempat pusat produksi dan distributor utama bagi pemenuhan konsumen yang membutuhkan telah melekat menjadi aktivitas padat ekonomi di Kota Bandung. Letak geografis yang dikelilingi oleh dataran tinggi menghasilkan suasana cuaca Bandung yang sejuk sekaligus disenangi oleh turis lokal maupun mancanegara. Oleh sebab itu, Bandung dijadikan sebagai salah satu tujuan utama bagi para turis untuk berwisata. Pemerintahan Kota Bandung pun memanfaatkan kelebihan letak geografis tersebut dengan memaksimalkan potensi daerah dengan menyediakan banyak fasilitas wisata dan menjadi daya tarik daerah disekitarnya.

Kepadatan Kota Bandung dalam Detik Jabar pada tanggal 27 Maret 2022 terjadi karena penggunaan bahu jalanan yang dipenuhi oleh kendaraan yang parkir secara sembarangan. Tidak sedikit juga masyarakat berswafoto ditempat-tempat *iconic* Kota Bandung termasuk warga lokal maupun pengunjung wisata.

Adapun masyarakat yang menghentikan sepeda dengan bebas ketika berolahraga. Kemudian kepadatan jalan juga dipengaruhi oleh keluar dan masuknya kendaraan di Kota Bandung dalam rangka kunjungan wisata dan berlibur terutama di akhir pekan.

Pada laman berita Jabarnews tanggal 11 Juli 2022 Kota Bandung memiliki permasalahan menahun mengenai kemacetan ini belum tuntas dan masih menjadi perhatian publik. Permasalahan mengenai kemacetan di persimpangan belum juga mampu terurai, bahkan di beberapa titik kota semakin mengalami kepadatan. Dinas Perhubungan Kota Bandung disoroti akibat program upaya menanggulangi kemacetan yang belum optimal. Program seperti penerapan rekayasa jalan, melakukan pembenahan parkir liar dibahu jalan, kemudian Dinas Perhubungan Kota Bandung juga berupaya mentransformasi angkutan yang akan diterapkan untuk lima trayek awal pada 2023. Adapun dalam mengurangi kemacetan dilakukan dengan menempatkan 250 petugas di sejumlah titik kepadatan.

Penduduk yang padat akhirnya menimbulkan efek terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di lingkungan Kota Bandung. Perekonomian yang padat tersebut dapat dilihat dari ramainya pedagang kaki lima diberbagai titik Kota Bandung. Salah satu daerah dengan jumlah pedagang kaki lima yang padat ada didaerah Cihampelas. Daerah tersebut merupakan daerah pusat perbelanjaan sekaligus menjadi salah satu titik kemacetan yang ada di Kota Berikut data jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung berdasarkan pintu masuk Kota Bandung :

Tabel 1.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Bandung

Jenis Wisatawan	Perkiraan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung		
	2019	2020	2021
Wisatawan Mancanegara	252.842	30.210	37.417
Wisatawan Domestik	8.175.221	3.214.390	3.704.263
Jumlah	8.428.063	3.244.600	3.741.680

Sumber : Website Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2022

Permasalahan kemacetan di Kota Bandung semakin memburuk terutama pada hari libur. Hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga pemerintah dianggap tidak siap dalam menanggulangi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Mobilisasi para pendatang yang tidak yang tidak terkendali juga menimbulkan parkir liar yang semakin marak. Kondisi tersebut ditemukan diberbagai pusat Kota Bandung yang dapat dilihat dari sepanjang lajur jalan. Kemacetan yang terjadi di Kota Bandung semakin parah dari waktu ke waktu.

Keputusan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pemecah permasalahan yang menyangkut kepentingan umum disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibentuk tersebut dapat ditemukan berupa sebuah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan bentuk lainnya merupakan produk dari kebijakan publik.

Kebijakan berkaitan dengan segala bentuk kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Maka, kebijakan dalam hal ini merupakan dasar petunjuk dalam penyelenggaraan suatu aktivitas.

Guna mencapai akuntabilitas pemerintah yang prima dalam mengurangi kemacetan maka melalui Dinas Perhubungan dilakukan pembenahan jalan. Pembenahan yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai kepanjangan kemajuan sistem Pemerintah Daerah yang memiliki tujuan guna memenuhi aspirasi dan merespon keresahan masyarakat khususnya di Kota Bandung yang memiliki tingkat kemacetan sangat tinggi.

Pada sisi lain, perluasan dan pengembangan area jalan di Kota Bandung cukup sulit dilakukan karena kepadatan penduduk yang melampaui kapasitas, mendorong justifikasi bahwa transportasi publik diharapkan mampu menjadi solusi dari segala bentuk kemacetan yang terjadi di Kota Bandung akibat *life style* yang konsumtif. Rencana mengoptimalkan moda pengangkutan yang tinggi, transportasi publik diharapkan mampu memaksimalkan kapasitas sumber daya serta jaringan yang ada.

Selain melakukan pembenahan jalan, salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengurai kemacetan yang terjadi dengan memberikan pembaruan transportasi pelayanan publik bernama Trans Metro Bandung. Kendaraan yang bernama Trans Metro Bandung (TMB) tersebut merupakan penyedia transportasi umum yang beroperasi di Kota Bandung dengan lima puluh enam (56) titik pemberhentian. Rute jalan yang ditempuh oleh Trans Metro Bandung (TMB) mencakup wilayah Utara Kota Bandung dengan pemberhentian di daerah Sarimanis

ke Selatan Kota Bandung dengan satu pemberhentian di lingkungan LPKIA. Adapun di wilayah Barat Kota Bandung, pemberhentian dilakukan di daerah Gunung Batu (Cimahi). Sedangkan titik pemberhentian wilayah Timur Kota Bandung berada di Pasar Induk (Gede Bage) Kota Bandung.

Saat ini, tuntutan masyarakat terhadap moda transportasi yang cepat, ekonomis, aman dan nyaman semakin berkembang. Hal tersebut selaras dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga transportasi yang ditawarkan saat ini tentu memiliki pengaruh besar. Pada sisi lain, masyarakat juga telah masuk pada era globalisasi, dimana selera serta harapan terhadap aktivitas mobilitas semakin jeli dan berkembang maka hal tersebut menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat juga dalam memberikan pelayanan publik.

Trans Metro Bandung (TMB) diciptakan guna mereformasi sistem angkutan perkotaan yang telah tersedia sebelumnya. Inovasi tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses transportasi yang layak, murah, terjangkau, tepat waktu, nyaman dan aman. Trans Metro Bandung (TMB) merupakan suatu angkutan umum yang dijadikan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang transportasi darat di kawasan perkotaan sebagai pusat kemacetan. Trans Metro Bandung (TMB) berbasis bis yang mengganti sistem setoran menjadi sistem pelayanan (*buy the service*).

Berikut data jumlah penumpang Trans Metro Bandung (TMB) di Kota Bandung :

Tabel 1.2

Jumlah Penumpang Trans Metro Bandung (TMB) di Kota Bandung

Data Jumlah Penumpang Trans Metro Bandung (TMB)		
No.	Tahun	Jumlah Penumpang
1.	2019	634.854
2.	2020	360.749
3.	2021	334.073

Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Bandung, 2022

Trans Metro Bandung memiliki sistem pemberangkatan bis secara terjadwal, berhenti pada halte khusus, nyaman, aman, ramah lingkungan dan terjangkau sebagaimana Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 158 ayat (1) dan (2). Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut melalui aturan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perhubungan di Kota Bandung. Adapun Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025. Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pengoperasiaan Trans Metro Bandung. Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551.2/Kep 694-DisHub/2008 tentang Tarif Angkutan Umum Massal Bus Trans Metro Bandung (TMB). Adapun peraturan Nomor 265 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Pada Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kota Bandung.

Namun dalam implementasinya, Trans Metro Bandung hingga kini masih menimbulkan permasalahan seperti :

- a. kurangnya pelayanan yang dilakukan terhadap para pengguna bis;
- b. kemacetan masih dirasakan oleh masyarakat;
- c. keluhan mengenai fasilitas;
- d. rendahnya jumlah pengguna

Hal tersebut juga ditambah dengan adanya kondisi krisis yang terjadi pada tahun 2022. Pandemi Covid-19 ditahun 2022 masih menjadi permasalahan yang ditangani pemerintah sehingga pembatasan kegiatan terus diberlakukan demi menekan potensi peningkatan kasus varian baru Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, keadaan yang tidak normal tersebut menyebabkan adanya batasan dalam mobilisasi masyarakat. Istilah WFH (*Work From Home*) menjadi penamaan baru untuk melakukan segala aktivitas dirumah. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk aktif melakukan mobilisasi sehingga dianjurkan berkendara khususnya menggunakan transportasi publik. Dampak dari pembatasan kegiatan tersebut menyebabkan jumlah pengguna Trans Metro Bandung mengalami penurunan secara drastis.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti fokus pada tulisan ini dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti yakni, bagaimana implementasi program Trans Metro Bandung (TMB) dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung pada tahun 2022?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan latar belakang di atas, maka tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) dalam menekan kemacetan kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan melengkapi literatur keilmuan Indonesia terutama dalam bidang sosial dan politik sebagai bahan kajian, referensi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan refleksi bagi dunia akademisi terutama untuk pelaku pejabat publik sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam memberikan pelayanan yang prima dan mengatasi permasalahan kemacetan yang menahun di Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai rujukan bagi kebijakan publik serta upaya yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kemacetan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan suatu perbandingan

dan acuan dengan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun tujuan adanya penelitian terdahulu ini guna menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka dalam kajian ini, peneliti menjabarkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Suci Ramadhani, dkk (2017)

Penelitian Suci Ramadhani, dkk (2017), dengan berjudul “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan dan Kepadatan Lalu Lintas di Medan” yang bersumber dari Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik (JMTRANSLOG), vol 4 (2), hal 148-158. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi alternatif mengurai tingkat kepadatan dan kemacetan lalu lintas serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan transportasi di Kota Medan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis dan dievaluasi menggunakan *Analitic Hierarchy Process* (AHP). Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan *purposive* dimana responden yang dipilih ialah narasumber yang memiliki kompetensi dalam mengkaji sebuah kebijakan mengatasi kemacetan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramadhani, dkk (2017) dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kota Medan dapat diatasi dengan kebijakan yang lebih efektif pada transportasi publik serta adanya penegakan aturan yang lebih konsisten oleh pemangku dan pelaksana kebijakan, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk memenuhi aturan kebijakan transportasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka pada permasalahan ini beberapa pihak seperti pemangku kepentingan, pelaksana kebijakan hingga

masyarakat perlu menjadi kesatuan yang kompak dalam mewujudkan kebijakan transportasi yang lebih efektif.

1. Hasil Penelitian Novy Setia dan Mi'rojul Huda (2017)

Penelitian Novy Setia dan Mi'rojul Huda (2017), berjudul "Kebijakan Revitalisasi Sistem Transportasi Publik Sebagai Langkah Antisipatif Kemacetan Total di Kota Malang" yang bersumber dari jurnal Ilmu Pemerintahan : Cosmogov, vol 3 (1), hal 116-126. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengambil studi kasus berlokasi di Kota Malang. Teknik pengumpulan penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan para informan terkait. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan revitalisasi sistem transportasi publik di Kota Malang sebagai salah satu upaya dalam memberikan antisipasi kemacetan total yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novy Setia dan Mi'rojul Huda (2017) dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemacetan di Kota Malang dapat dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang menunjang penguraian kemacetan seperti pelebaran jalan dan pengadaan transportasi publik yang layak. Adapun dalam perumusan kebijakan, pemerintah perlu menggandeng akademisi dalam menentukan langkah taktis serta strategis guna mendukung program kebijakan mengatasi kemacetan Kota Malang. Aspek lainnya guna mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif maka dibangun *mindset* serta gaya hidup dari semula lebih eksklusivisme penggunaan kendaraan pribadi kemudian beralih pada moda transportasi publik.

2. Hasil Penelitian Wisnu Mahardika (2017)

Penelitian Wisnu Mahardika (2017) dengan berjudul “Analisis Prioritas Kebijakan Penanganan Kemacetan Jalan Raya Serpong Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP) yang bersumber dari jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, vol 33 (2), hal 164-174. Metode tersebut digunakan dalam menganalisis 10 kebijakan penanggulangan kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Serpong Kota Tangerang Selatan yang diusulkan oleh *key-person*. Alternatif-alternatif yang digunakan dalam menganalisis topik ini dibagi kedalam tiga aspek, yaitu Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya, dan Aspek Infrastruktur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Mahardika (2017), maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini kebijakan mengenai pembangunan flyover menjadi prioritas dalam penanganan kemacetan di Jalan raya Serpong. Pembangunan flyover dapat dijadikan sebagai prioritas dan alternatif yang cukup tinggi diantara alternatif-alternatif lainnya.

3. Hasil Penelitian Akhmad H., Munir S., Delfina R. (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad H., Munir S., Delfina R. (2022) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Ganjil Genap dalam Mengatasi Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta” yang bersumber dari jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani vol. 9 (1), hal 50-52. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan tersebut guna mengurai kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif melalui pendalaman wawancara bersama informan. Berdasarkan penelitian oleh Akhmad H., Munir S., Delfina R. (2022) dapat disimpulkan bahwa kebijakan ganjil genap

yang diimplementasikan sudah menunjukkan adanya efektivitas dibuktikan dengan adanya trotoar bagi pejalan kaki, kemacetan yang terjadi sudah mulai berkurang dan penggunaan transportasi yang tersedia sudah mulai digunakan sebagai alternatif oleh masyarakat. Namun disisi lain tentu permasalahan lain bermunculan dimana masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor atau mobil pribadi seperti memalsukan nomor registrasi kendaraan pemilik.

Sementara dampak positif yang ditimbulkan ialah adanya peningkatan kebiasaan masyarakat untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian dimana mengangkat isu kemacetan dan menganalisis dampak dari upaya kebijakan yang diimplementasikan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini diketahui pada fokus penelitian yang dipilih dimana lokasi yang dipilih oleh Akhmad H., Munir S., Delfina R. (2022) ialah DKI Jakarta yang memiliki inovasi kebijakan ganjil genap dalam upaya melerai kemacetan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian jurnal peneliti terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai topik yang diangkat terkait implementasi kebijakan yang menjadi fokus utama penelitian. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah pada titik lokus penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan tersebut berlokasi di Kota Malang, Medan, Tangerang, DKI Jakarta dan lain sebagainya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada teori dan

metodologi yang digunakan. Metodologi pada penelitian terdahulu salah satunya menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP). Penelitian terdahulu yang telah diuraikan menggunakan teori menurut Edwards mengenai implementasi kebijakan publik yang memiliki empat faktor atau variabel krusial, yaitu, sumber daya, struktur birokrasi komunikasi, dan disposition (sikap/komitmen) dan berbeda dengan teori yang digunakan peneliti. Sementara penelitian lainnya menggunakan teori Palumbo (1987) yang menggambarkan analisis kebijakan dengan komponen-komponen sebagai berikut: (1) Agenda setting, (2) Problem definition, (3) Policy Design (rancangan kebijakan), (4) Policy legitimation (legitimasi kebijakan), (5) Policy implementation, (6) Policy impact, (7) Termination. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S Grindle dengan fokus pada isi kebijakan dan konteks implementasinya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik berasal dari terjemahan bahasa Inggris dengan istilah Public Policy dan beberapa para ahli mendefinisikan kebijakan publik menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (1970:71) dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang bahwa kebijakan diartikan sebagai suatu program yang memiliki tujuan, disertai dengan nilai-nilai, praktek yang dilakukan secara terarah (Nugroho, 2014:125).

Adapun definisi kebijakan dikemukakan oleh Carl J. Friedrich dan Friedrich dalam Budi Winarno (2002:16) bahwa hal tersebut digambarkan seperti serangkaian tindakan yang diinisiasi oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang didalamnya terdapat hambatan dan kesempatan pada pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. James E. Anderson (1979:4) mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu untuk diikuti dan diimplementasikan oleh sasaran target baik individu atau kelompok pelaku dalam memecahkan persoalan tertentu. Sementara publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang artinya umum, keanekaragaman, rakyat, masyarakat. Makna publik banyak didefinisikan oleh para ahli seperti menurut Syafii (2006:18) mengungkapkan bahwa publik merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan berpikir, perasaan, harapan sikap serta tindakan yang sesuai dan bersifat baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki. Maka kebijakan publik dipandang sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye dalam Islamy (2009:19) kebijakan publik merupakan segala bentuk pilihan pemerintah guna dilakukan atau tidak dilakukan. Pada upaya mencapai suatu tujuan dari sebuah negara, pemerintah dapat mengambil keputusan yang harus dilakukan ataupun tidak dilakukan. James E. Anderson dalam buku *Public Policy Making*, New York mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau instansi pemerintah. Menurut Parsons (2006:15), kebijakan dapat dimaknai sebagai proses interaksi yang dilakukan antara negara dengan rakyat dengan aksi atau rencana yang

mengandung unsur politik. Agus Suryono (2014:98) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat secara lingkup publik, artinya merupakan lingkup bersama. Hal ini menggambarkan bahwa lingkungan publik sendiri membutuhkan interaksi antara negara dengan warganya dalam melakukan pengambilan keputusan yang salah satunya terkait masalah masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Permasalahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat perlu diselesaikan dengan mengidentifikasi faktor permasalahan yang ada.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus terbentuk atas pertimbangan masalah-masalah memadai. Kebijakan perlu dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan analisis serta metode yang benar sehingga mampu menghasilkan solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada. Maka dari itu, jika masalah publik ingin ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan publik perlu dilakukan sebuah wadah bagi kelompok yang berfokus guna mendorong masalah sosial tersebut sebagai dasar pembuatan kebijakan (Winarno, 2012: 123). Menurut Charles O. Jones (1984: 25) dalam buku Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia, istilah kebijakan atau sering disebut *policy term* yang digunakan dalam praktek sehari-hari untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk dapat mencapai sebuah sasaran target yang diinginkan. Implementasi kebijakan selalu berkaitan dengan pola aturan yang dilakukan oleh individu, lembaga pemerintahan maupun swasta. Implementasi tersebut berhubungan dengan berbagai

kegiatan program yang difokuskan pada terlaksananya tujuan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penerjemahan peraturan kedalam bentuk Tindakan sehingga dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat kompleks dan bermuatan politis karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan (Agustino, 2008:139).

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dapat dipengaruhi karena dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan implementasi. Menurut Merilee S. Grindle, setiap kebijakan perlu memiliki indikator tingkat keberhasilan, tujuan dari kebijakan serta program yang akan dijalankan sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam penerapan atau implementasi kebijakan. Kedua variabel tersebut meliputi seberapa jauh kepentingan kelompok sebagai sasaran atau target yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Kemudian variabel tersebut juga mengukur sejauh mana perubahan yang direncanakan dalam kebijakan. Mengukur ketepatan letak kebijakan yang dibuat serta sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dapat direalisasikan.

Sementara menurut Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) menyebutkan bahwa model implementasi kebijakan menurut Merilee S Grindle ditentukan oleh konteks atau isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kebijakan yang telah ditransformasikan kemudian dapat diimplementasikan melalui :

- a) Isi kebijakan (*Content of Policy*)
 - 1. Kepentingan yang memengaruhi
 - 2. Tipe manfaat yang dihasilkan
 - 3. Derajat perubahan yang diharapkan

4. Posisi/Kedudukan pengambilan keputusan
 5. Aktor Pelaksana program
 6. Sumber daya yang berperan
- b) Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 2. Karakteristik lembaga dan penguasa
 3. Kepatuhan dan daya tanggap

Teori implementasi kebijakan menurut Merilee S Grindle memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait isi kebijakan baik dalam implementor, target implementasi, hingga konflik yang mungkin dapat terjadi diantara para aktor implementasi dan sumber daya implementasi yang digunakan dalam penerapan suatu kebijakan. Maka dari itu, teori implementasi kebijakan Grindle digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan kemacetan yang terjadi di Kota Bandung

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep menurut Sugiyono (2012:31) merupakan sebuah proses guna membedah lebih dalam dan menurunkan konsep-konsep penelitian kedalam bagian-bagian agar mudah dipahami dan dapat diukur. Istilah konsep digunakan untuk menjabarkan secara abstrak bagaimana suatu kondisi, kejadian dalam suatu kelompok maupun individu dalam kehidupan sosial. Penulis mengemukakan definisi konsep untuk mendapatkan batasan yang jelas. Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan dan mempertimbangkan fokus penelitian, maka peneliti menguraikan berbagai kerangka pemikiran dengan teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penelitian

Berdasarkan pertimbangan pengertian teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di dalam tinjauan pustaka, maka peneliti menggunakan komponen dengan model sistem implementasi kebijakan untuk menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan melalui konsep penelitian yang dioperasionalkan yaitu seperti berikut :

A. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1) Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest affected*)

Adanya kepentingan yang berlandaskan keresahan publik. Kepentingan tersebut menyangkut permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

2) Tipe manfaat yang dihasilkan (*Type of benefits*)

Tersedianya transportasi umum yang terpadu dan terintegrasi, tertib, aman, lancar, tarif yang ekonomis dan mudah bagi masyarakat, memperhatikan aspek lingkungan.

3) Derajat perubahan yang diharapkan (*Extent of change envision*)

Banyaknya jumlah pengguna Trans Metro Bandung, penurunan kepadatan mobilitas, perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi di Kota Bandung dari hasil implementasi kebijakan program Trans Metro Bandung (TMB).

4) Posisi/Kedudukan pengambilan keputusan (*Site of decision making*).

Kedudukan serta letak pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) yang

diimplementasikan didasari oleh hukum yang mengikat.

5) Aktor Pelaksana program (*Programme implementer*)

Pengawas Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan melakukan koordinasi. Pengawas Kebijakan memberikan penilaian pada pelaksanaan kebijakan, melakukan tindakan korektif pada pelaksanaan kebijakan. Pengawas dan Pelaksana memberikan tindakan dalam pelaporan yang diberikan masyarakat. Pengawas dan Pelaksana kebijakan melakukan perannya masing-masing sesuai fungsinya.

6) Sumber daya yang berperan (*Resources committed*)

Jumlah staf yang produktif dalam menjalankan program Trans Metro Bandung (TMB). Keahlian staf yang memadai dalam mendukung keberjalanan program. Adapun fasilitas penunjang seperti shelter/halte, AC, *Handgrip*, dsb berfungsi dengan baik.

B. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*Power, interest, and strategy of actor involved*)

Keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan program. Kepentingan dari adanya kerja sama pihak ketiga ialah bagi masyarakat, strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and regime characteristic*)

Lembaga berkomunikasi secara terbuka terhadap kritik masyarakat, melakukan pembinaan terhadap operasional penyelenggaraan perhubungan, mengatur penyelenggaraan perhubungan, memberikan pengawasan serta

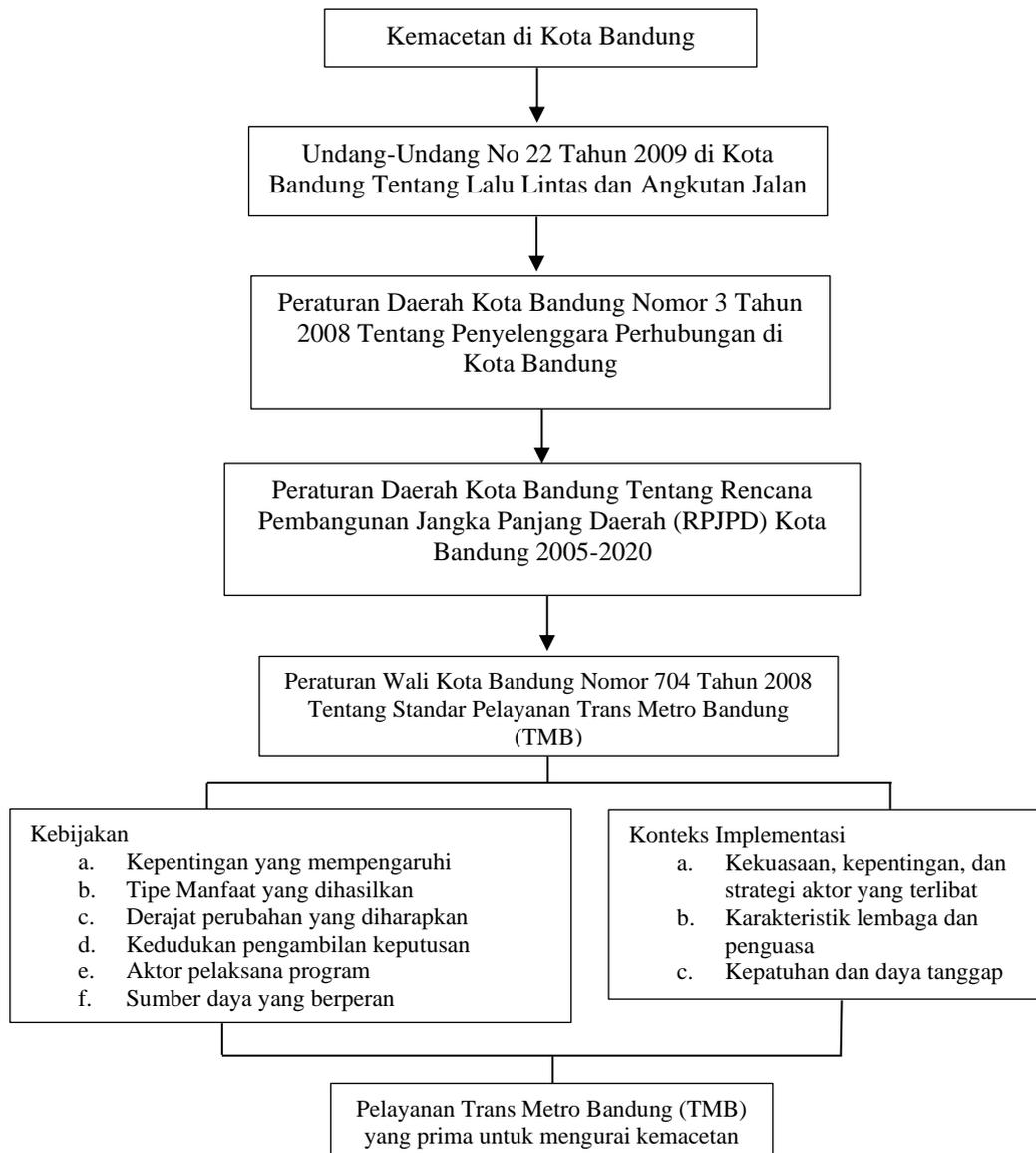
melakukan pengendalian penyelenggaraan perhubungan.

3) Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and responsiveness*)

Pelaksanaan program berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat. Masyarakat memberikan masukan kepada penyelenggara sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bandung merespon secara cepat dalam kurun waktu yang singkat.

1.8 Kerangka Berpikir

Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini :



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari tipe kualitatif deskriptif ini ialah berupaya untuk dapat menjelaskan fenomena kasus yang terjadi dengan menyajikan data serta fakta dilapangan. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk dapat mengangkat secara ideografis segala kasus dan realitas sosial yang terjadi (Somantri, G. R., 2005:64). Fenomena yang dikaji melalui tipe kualitatif deskriptif ini ialah “Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung (TMB) dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Bandung”.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandung karena kebijakan dalam mengurangi kemacetan ini merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan sebagai sub bagian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat khususnya dalam bidang transportasi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian mengarah pada pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam program pengadaan bis Trans Metro Bandung (TMB) di Kota Bandung.

1. Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung (1 orang)
2. DPRD Kota Bandung (1 orang)
3. Lembaga Swadaya Masyarakat Kompas (1 orang)
4. Petugas teknis Trans Metro Bandung (2 orang)

5. Masyarakat Pengguna Trans Metro Bandung (4 orang)

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

1.9.4.1 Data Primer

Salah satu data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer dimana ini merupakan data yang diperoleh langsung untuk memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2009:32). Sumber data primer diperoleh melalui beberapa keterangan dan penjelasan dari perusahaan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian. Data primer didapatkan peneliti langsung dari objek penelitian sebagai sumber utama. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil kegiatan wawancara bersama responden terkait. Adapun yang menjadi responden tersebut ialah staf dari Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.9.4.2 Data Sekunder

Selain peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data penelitian, penulis juga menggunakan data sekunder yang sumber datanya diperoleh tidak langsung kepada pengumpul data. Data sekunder yang dilakukan oleh penulis melalui literatur dan studi pustaka untuk menunjang kelengkapan data sesuai fenomena yang diangkat. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa buku-buku, dokumen, jurnal, artikel yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1.9.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sebelumnya telah melalui studi pendahuluan terlebih dahulu untuk kemudian menemukan fenomena yang harus diteliti namun satu sisi peneliti juga ingin mengetahui lebih mendalam hal-hal yang berhubungan dengan fenomena kasus tersebut. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber untuk berinteraksi aktif dan mencapai tujuan data fakta yang diinginkan (Newman, 2013:493).

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis dan dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Narasumber dalam wawancara ini terdiri Yudi Cahyadi, SP (Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung), Fajar Budhi Wibowo (Koordinator Umum LSM Kompas (Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi), Bagus Sugi Pratama, ST (Staf UPT Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung), Iwan (Petugas Trans Metro Bandung), Imam (Petugas Trans Metro Bandung), Anggun Tamy (Pengguna Trans Metro Bandung), Maidina Hasna (Pengguna Trans Metro Bandung), Bagus Abudurrachman (Pengguna Trans Metro Bandung), Sabila (Pengguna Trans Metro Bandung).

1.9.5.2 Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik merekam informasi agar mudah diproses, dianalisis dan ditafsirkan (Rosaliza, 2015:75). Tujuan dokumentasi ini agar jawaban subjek berupa rekaman, notulensi dan transkrip yang bersangkutan dapat dipahami secara objektif dari fenomena terkait.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis dimana dilakukan suatu teknik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diseimbangkan dengan data yang valid berdasarkan konteks. Teknik analisis digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan dalam mengurai kemacetan di Kota Bandung.

1.9.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses dalam pemusatan perhatian, pemilihan, pengabstrakan dan penyederhanaan yang berubah dari data kasar yang muncul dari notulensi di lapangan. Reduksi biasanya berupa menelusur tema, meringkas data, mengkode serta membuat gugus-gugus dengan menyeleksi data secara ketat lalu diringkas dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih luas (Rijali, 2019:91).

1.9.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu tahapan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dengan cara disusun, sehingga diharapkan dapat menggambarkan kemungkinan dari hasil penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang telah diteliti. Peneliti mencatat seluruh keteraturan catatan teori dengan penjelasan-penjelasan serta alur sebab akibat yang sudah didapatkan (Agusta, 2003:10).

1.9.6.3 Penarikan Kesimpulan

Mappiare (dalam Gumilang, 2016:157) kesimpulan data diperoleh sebagai upaya untuk mencari makna arti dan penjelesaian dari data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis sesuai pola dan hubungan. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menganalisis data dengan melibatkan penyorotan dengan tajam dan ketat